Sriwijaya Journal of Internasional Relations

ISSN 2963-6108 (cetak)
ISSN 2963-4865 (online)
Vol 2 No 2, Desember 2022
Halaman 70-87

STRATEGI KEBIJAKAN *BLUE ECONOMY* INDONESIA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA ERA JOKO WIDODO

Y. A. Wahyuddin[1], Raka Maypangestu Hidayat[2], Tri Ridho Verdiansyah[3]

[123]Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

SUBMISION TRACK

Recieved: 26 October 2022
Final Revision: 4 October 2022
Available Online: 30 December 2022

KEYWORD

Blue Economy, Marine and Fisheries Sector Sustainable, Development Goals (SDGs)

ABSTRACT

This article analyzes Blue Economy policy-making related to the concept of sustainable development (SDGs) promoted by the United Nations by Indonesia during the Joko Widodo era. Sustainable development is a development agenda that has become a global work. This paper also discusses the relevance of the Blue Economy to the SDGs, the Blue Economy Strategy Model implemented by Jokowi Dodo, and the Analysis of Blue Economy Policy Making. This paper uses a descriptive-qualitative research method. The Blue Economy policy analysis uses the Decision Making theory of the Rational Actor Model, which was initiated by Graham T Alisson. As a result of the analysis, it was found that there are goals and objectives, alternatives, consequences or consequences, and also options for Indonesia's marine ecosystems. Jokowi's goals and objectives for implementing the Blue Economy are to support the success of the SDGs and conserve Indonesia's marine ecosystems until 2030. Joko Widodo's alternative is to combine the concept of green economy development with the blue economy. In this case, Indonesia needs to stop all exploitation activities and actions that have an impact on national profits and convert them to exploration and innovative techniques. Thus, the Blue Economy is Joko Widodo's choice to support sustainable development and maintain Indonesia's marine ecosystem.

KATA KUNCI

Ekonomi Biru, Pembangunan Berkelanjutan, Sektor Kelautan dan Perikanan

CORRESPONDENCE

Email : Kkraka1705@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pengambilan kebijakan *Blue Economy* yang dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diusung *United Nations* oleh Indonesia pada era Joko Widodo. Pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu agenda pembangunan yang menjadi kerja global. Tulisan ini juga membahas terkait relevansi *Blue Economy* dengan SDGs, Model Strategi *Blue Economy* yang diterapkan Jokowi Dodo, dan Analisis Pengambilan Kebijakan *Blue* Economy. Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Analisis kebijakan *Blue Economy* menggunakan teori *Decision Making* tipe Model Aktor Rasional yang dicetus oleh Graham T Alisson. Sebagai hasil analisis, ditemukan bahwasanya terdapat tujuan dan sasaran, alternatif, konsekuensi atau akibat, dan juga pilihan untuk ekosistem laut Indonesia. Tujuan dan sasaran Jokowi menerapkan *Blue Economy* adalah untuk mendukung suksesnya SDGs dan menkonservasi ekosistem laut Indonesia hingga tahun 2030. Adapun alternative dari Joko Widodo menggabungkan konsep pembangunan ekonomi *Green Economy* dengan

Blue Economy. Dalam hal ini, Indonesia perlu memberhentikan segala aktifitas dan tindakan eksploitasi yang berdampak pada keuntungan nasional dan dialihfungsikan ke eksplorasi dan *innovative techniques*. Dengan demikian, Blue Economy menjadi pilihan Joko Widodo untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga ekosistem laut Indonesia.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Perubahan iklim atau *climate change* merupakan isu lingkungan kontemporer yang memberikan dampak sangat signifikan bagi keberlangsungan hidup penduduk bumi. Isu climate change ini telah menjadi suatu masalah vital yang kerap dibahas di berbagai konferensi internasional dan berhasil menyita perhatian masyarakat global. *Climate Change* mengakibatkan musim kemarau yang berkepanjangan, desertifikasi, penumpukan sampah, peningkatan volume air laut, pencemaran udara, berkurangnya sumber air, dan lain-lain. Hal ini umumnya disebabkan karena efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapizan ozon, kerusakan fungsi hutan, *penggunaan Cloro Flour Carbon* (CFC) yang berlebihan, dan gas buang industri (Nurhanisah, 2020).

Ekosistem laut dan perikanan merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan oleh konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal ini dikarenakan laut memainkan peran yang penting dalam perubahan iklim. *It covers more than 70% of the planet's surface, regulates its climate, and supplies much oxygen* (Marine Stewardship Council, 2022b). *Oceans are also home for 500.000 to 10 million marine species and supply for about 99% edible food for humankind* (Marine Stewardship Council, 2022a; National Geographic Indonesia, 2019). Lautan juga mensirkulasi 83% dari karbon dunia, menyerap 30% karbondioksida (CO2) dan 93% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Marine Stewardship Council, 2022a; National Geographic Indonesia, 2019).

Ekosistem laut juga terkena dampak dari gejolak arus perubahan iklim. *According to the United Nations FAO's 2020 State of World Fisheries and Aquaculture* (SOFIA), penangkapan ikan illegal atau *beyond sustainable limits* terjadi sebesar 34.2% (FAO, 2020; Marine Stewardship Council, 2022). Lebih lanjut, berdasarkan data dari *WWF's Living Blue Planet Report* 2015, jumlah populasi di laut menurun sebesar 49% dalam rentang waktu 1970-2012 (Marine Stewardship Council, 2022; Zoological Society of London., 2015). Dalam 30 tahun terakhir, *marine heatwaves* atau gelombang panas laut

diperkirakan telah naik *by more than* 50% dan diprediksi pada tahun 2100 temperature lautan akan naik menjadi 1-4 derajat celcius (Marine Stewardship Council, 2022). Data-data di atas yang menunjukan akan keprihatinan kondisi ekosistem laut saat ini membutuhkan suatu terobosan baru yang inovatif dan solutif dalam rangka menyelamatkan planet kita, bumi, khususnya ekosistem kelautan di Indonesia

Pembahasan terkait perubahan iklim dalam sektor kelautan tidak akan terlepas dari sentuhan dan peran negara Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia merupakan negara archipelago dengan luas wilayah perairannya sebesar 70% (Sari & Muslimah, 2020). Negara Indonesia tersebar dari 17.500 pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km (Indonesia baik, 2018). Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, total area perairan Indonesia diperkirakan seluas 6.4 juta km2, dari jumlah total keseluruhan wilayah darat dan laut di Inodnesia, 8.3 juta km2 (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2018; Sari & Muslimah, 2020). Yang dengannya, Indonesia *unintentionally* ikut berkontribusi dalam perubahan iklim pada sektor kelautan seperti naiknya permukaan laut, naiknya temperatur global dan laut, cuaca ekstrim, dan pengasaman laut (Sari & Muslimah, 2020). Indonesia, dalam hal ini, sudah sepatutnya mencari jalan keluar yang berkelanjutan dalam memanfaatkan pernak-pernik hasil alam laut guna menyelamatkan generasi berikutnya.

Kontribusi kekayaan laut Indonesia tidak hanya memiliki impact kepada perubahan iklim atau krisis kondisi lingkungan global saja, melainkan juga memberikan sumbangsih kepada perekonomian domestik Indonesia. Pada sisi *Indonesia's marine economic potential*, keuntungan yang dapat diraih dari hasil laut atau perairan Indonesia per tahunnya adalah sebesar 1.33 trillion US$ (Sari & Muslimah, 2020). Pada tahun 2017, bidang kelautan dan perikanan berkontribusi untuk produksi perikanan naik sebesar 23.186.442 tons dengan harga 384.48 trilliun rupiah (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018; Sari & Muslimah, 2020).

Kehadiran pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang sebagai bentuk jalan keluar atau terobosan baru dari segala krisis perubahan iklim dan keadaan lingkungan di planet bumi, khususnya ekosistem laut. Hal ini dikarenakan SDGs mengintegrasikan 5 prinsip dasar dalam pengimplementasian

kebijakannya, yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership* (Prayuda et al., 2019; UN Sustainbale Development Group, 2022). Yang oleh karenanya, segala bentuk kegiatan pembangunan ataupun aktivitas suatu negara kedepannya harus memperhatikan kelima prinsip dasar SDGs tersebut guna mencapai the 15 goals of SDGs tahun 2030.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut berpartisipasi aktif dalam menyongsong kesuksesan program pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diinisiasi oleh United Nations. Salah satu bukti partisipasi aktif Indonesia dalam SDGs adalah dengan menerapkan kebijakan *Blue Economy*, yaitu suatu konsep mengembangkan ekonomi namun secara bersamaan memperhatikan kondisi laut, alam, dan lingkungan sekitarnya (Sari & Muslimah, 2020). *Blue Economy* diperkenalkan pertama kali oleh Gunter Pauli. Gunter Pauli adalah seorang pendiri dan aktivis *Zero Emission Reaserch Initiative* (ZERI), melalui bukunya yang berjudul *'The Blue Economy'* dengan landasan konsepsi *'The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, and 100 milli0n jobs.* Model *Blue Economy* ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada para *entrepreuner*, bahwa the *blue economy business model* memberikan peluang investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan karena sistem *Blue economy* menggunakan sumber daya alam yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan. Menurut Gunter Pauli Blue economy berarti *"Blue ocean - Blue sky"*. Konsep ini dapat kita pahami dalam makna mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, namun laut dan langit tetap biru (Rani & Cahyasari, 2015).

Fokus Penerapan model Blue Economy yang dilakukan Indonesia di era Joko Widodo spesifiknya lebih mengarah kepada industri perikanan Indonesia. *Blue Economy* yang dijadikan sebagai landasan pola pembangunan ekonomi kelautan berfokus pada *ocean-based economy*. Selanjutnya untuk melihat wujud nyata pelaksanaan SDGs dalam *Blue Economy*, dalam hal ini khususnya presiden Joko Widodo sebagai aktor rasional dalam pemerintahan Indonesia saat ini memutuskan untuk melibatkan Indonesia sebagai anggota APEC. Terlibatnya Indonesia sebagai keanggotaan APEC diharapkan akan memudahkan Indonesia dalam melakukan *Blue Economy* melalui beberapa kerangka yang telah disiapkan yakni liberalisasi, fasilitasi perdagangan dan investasi (Rani & Cahyasari, 2015).

APEC yang dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan *Blue Economy* tujuannya adalah untuk mewujudkan kerjasama kemitraan antar anggota APEC dalam bidang kelautan dan perikanan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, tulisan yang berjudul, Analisis Penerapan Kebijakan *Blue Economy* Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia Era Joko Widodo, bertujuan untuk menganalisis peran Joko Widodo selaku aktor dalam menerapkan kebijakan *Blue Economy* di Indonesia dengan menggunakan konsep *Decision Making* Model Aktor Rasional.

KERANGKA KONSEP

Adapun beberapa konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan subjek yang akan dibahas pada bagian pembahasan. Konsep-konsep yang digunakan tentunya selaras dengan arah dan fokus pembahasan penelitian ini. Berikut konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian:

1. *Decision Making* (Model Aktor Rasional)

Pada penelitian ini menggunakan konsep dari *Decision Making* dengan model Aktor Rasional. Konsep ini lahir dari seorang ahli yakni Graham T Allison pada karya bukunya yang berujudul *"Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis"* yang dimana dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana seorang aktor yang memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan yang rasional dalam menyusun sebuah kebijakan yang akan digunakan aktor tersebut terbagi menjadi tiga yakni Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik. Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan salah satu dari model tersebut yakni Model Aktor Rasional, dalam pembahasan di penelitian ini aktor rasional yang menentukan dan menyusun kebijakan yang akan digunakan adalah Presiden Joko Widodo yang menyusun kebijakan dan menerapkan konsep dari Blue Economy. Model aktor rasional ini menekankan pada suatu proses pengambilan keputusan melewati beberapa tahapan yang menjadi aspek penting dalam penyusunan kebijakan yakni dari segi tujuan, opsi, konsekuensi yang akan muncul, dan pilihan dalam keputusan tersebut(Subagyo, 2004).

Dalam teori aktor rasional penyusunan kebijakan seorang aktor rasional merupakan seseorang yang terdidik dan terampil secara rasional dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana aktor tersebut juga harus mampu dalam

memperkirakan hasil dan menghitung nilai atau manfaat yang diharapkan dapat memberikan keuntungan. Maka dari itu, asumsi para pengambil keputusan menghitung nilai yang diharapkan pada tiap alternatifnya, dapat pula membandingkan seluruh alternatif yang ada, serta memilih alternative yang dapat memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Keputusan yang dipegang dan ditetapkan oleh sang aktor rasional tersebut harus dipilihnya dengan beberapa aspek alternatif yang lain dan memilih salah satu yang paling rasional untuk dijadikan kebijakan yang tetap (Afinotan, 2014).

Kebijakan yang dikeluarkan sebagai pilihan rasional memiliki beberapa komponen di dalamnya, antara lain tujuan dan sasaran, alternatif, konsekuensi, serta pilihan (Paramita, 2014) (Allison, 1968: 8). Maksud dan tujuan utama pilihan rasional di sini adalah keamanan dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, alternatif-alternatif yang diajukan dalam pembuatan kebijakan pun beragam dan juga mempertimbangkan akibat positif dan negatif yang dapat ditimbulkan. Pilihan atau kebijakan rasional adalah memaksimalkan nilai. Jadi, aktor rasional, dalam hal ini pengambil keputusan, memilih alternatif dengan hasil tertinggi untuk kemudian dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam keputusan kebijakannya.

2. Blue Economy

Blue economy atau jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah Ekonomi Biru yang dimana konsep ini muncul untuk mendukung jalannya konsep *Green Economy* yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan, pengurangan emisi atau rendah kabon, dan lain-lain yang beruhubungan dengan peningkatan dan pengembangan kualitas lingkungan yang dapat menguran emisi dan polusi terhadap lingkungan. *Blue Economy* ini muncul bersamaan dengan hadirnya *Green Economy* demi mendukung dari rencana atau misi dari green economi itu sendiri. Lain halnya denga green economy yang fokus pada lingkungan, *Blue Economy* berfokus untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Pada model pendekatan blue economy ini berusaha untuk tidak berpaku pada kegiatan ekonomi yang mengandalkan basis eksploitasi sumber daya dalam laut dalam artian tidak mengeruk seluruh sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki. Namun, blue economy memiliki tujuan lain yakni dengan meninggalkan praktek ekonomi lama yang hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek tetapi dapat menghasilkan dampak dalam

jangka panjang, selain itu *Blue Economy* juga berfokus untuk mengurangi emisi dan berusaha untuk mengurangi polusi lingkungan yang dapat merusak kestabilan alam. *Blue economy* masih tergolong konsep yang baru dalam perencanaan pembangunan di Indonesia namun melihat Indonesia menjadi salah satu negara maritime yang memiliki lautan yang luas dengan sumber daya alamnya yang kaya maka konsep dari *Blue Economy* ini dapat digunakan dalam pembangunan dan ekonomi pada bidang perikanan dan kelautan di Indonesia (Nurhayati & Putri, 2013).

Konsep *Blue Economy* dilandasi oleh dua prinsip fundamental. Pertama, efisiensi alam atau *nature's effieciency*, yang di mana konsep *Blue Economy* mencoba untuk menyelaraskan diri dengan siklus produksi ekosistem alam yang ditujukan untuk memperkaya sumber daya dan mengurangi segala tindakan eksploitasi berlebihan. Kedua, *Zero Waste*, yang di mana berarti limbah atau sampah dari suatu sumber daya diolah kembali agar bisa menjadi suatu bahan yang bermanfaat sehingga mampu menciptakan lingkungan dan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan (Rani & Cahyasari, 2015; Sari & Muslimah, 2020). Lebih lanjut, *Blue Economy* merupakan model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan antara pembangunan lautan dan daratan, menekan pengoptimalisasian penggunaan tekonologi, dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan dari sumber daya laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).

Indonesia dengan laut yang luas ditambah dengan sumber daya yang melimpah dapat mengadopsi konsep *Blue Economy* dikarenakan banyaknya masyarakat wilayah pesisir pantai yang banyak mencari ikan sebagai sumber penghasilan mereka harus didukung dengan konsep ini agar sumber daya yang diambil dalam laut tersebut tidak didapatkan dengan cara-cara yang salah dan tidak diambil secara keseluruhan. Impelementasi dari *Blue Economy* ini dapat mengunakan bantuan dari *stakeholder* yang berkaitan dengan masyarakat setempat agar dapat pemahaman yang tepat tentang konsep dari *Blue Economy* yang akan diterapkan. Konsep dari Blue Economy merupakan pemikiran atau paradigma yang memberikan konsep yang baru dengan tujuan yang dapat menghasilkan arus pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan yang seimbang *(sustain)* dan penggunaannya yang optimal. Melihat Indonesia yang memiliki wilayah pesisir

akan memberikan poin baik yang lebih dan dapat berpengaruh pada pembangunan dalam negeri. *Blue economy* diyakini dapat memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi dan memberikan keuntungan sekaligus pemberdayaan bagi masyarakat pesisir pantai. *Blue economy* ini juga tidak hanya ramah pada lingkungan *(environmental friendly)* tetapi dapat menjadi kas ganda *(multiple cash flow)* yang tentunya memberikan keuntungan yang berlipat ganda jika dalam implementasinya tepat dan sampai kepada masyarakat khususnya masyarakat pesisir (Prayuda et al., 2019).

3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pada konsep yang terakhir ini yakni konsep SDGs yang dimana peneliti menggunakan konsep ini karena berhubungan dengan fokus pembahasan dan subjek bahasan dari penelitian ini. Konsep dari *Blue Economy* yang berfokus pada bidang kelautan dengan aspek ekonomi yang bertujuan melindungi lingkungan laut, kelestarian alam, dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Jika diartikan ke bahasa Indonesia yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan dari kata-katanya dapat diartikan bahwa SDGs ini bergerak untuk proses pembangunan yang berkelanjutan, dalam tujuan pembangunannya ada 17 macam tujuan yang memiliki fokusnya masing-masing untuk pengembangan kualitas menjadi lebih baik dalam segala bidang. Upaya dari pemerintah Indonesia SDGs dapat menjadi prioritas dalam pembangunan nasional ang memerlukan kekuatan yang bersinergi satu sama lain baik dalam tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi agar pembangunan yang dilakukan dapat merata hingga kepelosok daerah Indonesia. Pada pembahasan dalam penelitian yakni berfokus pada bidang kelautan dan ekosistem kelautan maka dapat dilihat dari tujuan SDGs yang ke-14 yakni Ekosistem Lautan. Pada tujuan ekosistem kelautan dalam SDGs ini ada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia yakni pada tahun 2020-2014 yang berisikan tentang peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, peningkatan tata kelola peikanan, dan Revitilasi praktek perikanan berkelanjutan (Kementerian PPN, 2020).

Pada tujuan ke-14 ini berusaha untuk melestarikan dan menafaatkan secara berkelanjutan sumber daya dan kekayaan laut di laut samudera Indonesia. adapun target-target yang telah ditentukan dalam bdaing kelautan Indonesia yakni tata ruang laut dan pengelolaan terhadap wilayah laut itu sendiri, pembatasan penangkapan ikan

ayng aman, pemberantasan *IUU Fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan, selanjutnnya akan ada dukungan dari pemerintah terhadap nelayan kecil di wilayah pesisir pantai. Target-target yang telah dijabarkan tersebut dapat dijalankan oleh pihak pemerintah maupun organisasi non-pemerintah yang relevan (Bappeda Jogja, 2022).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan atau fenomena yang diteliti mengenai "Analisis Penerapan Kebijakan *Blue Economy* Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia Era Joko Widodo" maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian yang berupa deskriptif-kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, lebih tepatnya bukan angka-angka. Penelitian deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen)(Sugiyono, 2016) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Irawan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi konsep Blue Economy dengan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Indonesia dengan lautan yang luas dan sumber daya yang melimpah tentunya harus dikelola dengan baik agar lingkungan dan sumber daya alamnya tidak rusak. Kekayaan laut Indonesia dapat memberikan keuntungan sendiri bagi negeri Indonesia. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai harus mendapat pengetahuan yang baik mengenai bagaimana konsep *Blue Economy* yang akan diimplementasikan agar tujuan dari konsep ini dapat terlaksana dengan baik. Tujuan dari *Blue Economy* untuk disosialisasikan kepada masyarakat pesisir pantai agar para masyarakat dapat berfikir secara kritis mengenai konsep ini unuk meminimalisir pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan nantinya bisa mengambil sumber daya alam laut tersebut lebih efisien dan seimbang. Prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam pada konsep

Blue Economy ini yakni meningkatkan efisiensi sumber daya, sistem siklus pada produksi, meminimalisir pembuangan limbah, kepedulian sosial, inovasi, adaptasi, serta tata pada pengelolaan sumber daya alam yang baik agar nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik (Prayuda et al., 2019).

Pengaruh pada lingkungan tentunya juga mendapat dampak yang menekan pembuangan limbah yang akan berdampak buruk, hal ini tentunya menjadi poin tambahan dalam menerapkan konsep *Blue Economy*. *Blue economy* juga memprioritaskan pembangunan regional dengan tujuan untuk menciptakan lapagan pekerjaan yang baik, membangun modal sosial, meningkatkan pendapatan, dan meregenerasi ekosistem yang dimana pada pembahasan di penelitian ini berfokus paa ekosistem laut Indonesia dan menjaga sumber daya laut agar tidak digunakan atau dikeruk secara berlebihan (Pauli, 2010). Pada era Joko Widodo yang dimana konsep dari *Blue Economy* ini digunakan untuk melindungi sumber daya alam khususnya pada sektor laut Indonesia, hal ini dapat menguntungkan bagi Indonesia dalam keberlangsungan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) lebih khususnya pada poin SDGs yang ke-14 yakni tentang Ekosistem Laut yang tujuannya untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya alam kelautan dan samudera unuk pembangunan berkelanjutan. Adapun target-target yang disusun dan diharapkan oleh pemerintahan Indonesia untuk menyukseskan SGD khususnya pada poin ke-14 ini yang telah disusun untuk 5 tahun kedepan sejak tahun 2020.

Pada tahun 2020, pemerintah secara efektif telah mengatur secara permanen dalam menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan atau mengeruk ikan secara liar, kasus penengkapan ikan secara illegal dan praktek penangkapan ikan yang dapat merusak alam seperti penggunaan bom yang dapat merusak terumbu karang, kemudian melaksanakan rencana untuk pengelolaan berbasis pada ilmu pengetahuan, memulihkan persediaan ikan secara tepat dalam waktu yang sesingkat mungkin, dan dapat ke tingkat yang menghasilkan produksi hasil yang maksimum yang berkelanjutan sesuai dengan karateristik bilogisnya. Masih pada tahun sama, dalam melindungi dan melestarikan setidaknya ada 10 persen dari wilayah pesisir dan laut konsisten dengan hukum nasional dan internasional berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Pada tahun 2023, harapan dan

target untuk tahun tersebut adalah dapat meningkatmanfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara yang kurang dalam perkembangan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, dan pengelolaan perikanan, budidaya air serta pariwisata yang bekelanjutan di masa depan yang akan mendatang. Selanjutnya, pada tahun 2025 targetnya adalah mencegah dan mengurangi semua jenis pencemaran alam khususnya laut secara signifikan, kemudian sampah laut dan polusi nutrisi yang akan memberikan dampak buruk bagi laut dan sumber daya didalamnya (SGDs Bappenas, 2020).

Relevansi antara Blue Economy dengan SDGs setidaknya mencakup 4 poin. Pertama, *Blue Economy as a way out alternative of climate change* (SDGs 13). Kedua, Blue Economy mengeskplorasi SDA laut sekaligus mengkonservasi (SDGs 14). Ketiga, Blue Economy memberdayakan masyarakat dari segi pengetahuan (SDGs 4). Keempat, *Blue Economy* menciptakan lapangan pekerjaan melalui pembangunan regional (SDGs poin ke 1, 8, dan 9).

2. Model Strategi Blue Economy yang diterapkan Joko Widodo

Kebijakan manajemen perikanan di Indonesia pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, membagi wilayah perairan pengelolaan perikanan Indonesia menjadi 11 bagian yang ditercantum di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dalam Peraturan Menteri Nomor18/PERMEN-KP/2014(Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014). WPPNRI merupakan kebijakan manajemen perikanan yang mengatur terkait penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, *research and development* yang termasuk di dalamnya *inland waters, archipelagic waters, territorial seas, additional zones, and Indonesia's exclusive economic zone* (ZEE) (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014).

Model konsep *Blue Economy* Indonesia secara general berpacu pada pembangunan infrastruktur di sektor kelautan yang berkelanjutan dan pengelolaan atau manajemen pengambilan sumber daya laut yang tidak berlebihan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian kerangka konseptual di atas, penerapan konsep *Blue Economy* di Indonesia tidak terlepas dari dua prinsip fundamental *Blue Economy,* yaitu *nature's efficiency* dan *zero waste* (Rani & Cahyasari, 2015; Sari & Muslimah, 2020).

Penerapan *Blue Economy* juga tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi yang optimal karena dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, itu bisa mengakselerasi pertumbuhan, memperbagus pemilahan *product diversification,* dan dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan produksi untuk memproduksi bahan baru (Sari & Muslimah, 2020).

Konsep *Blue Economy* pada sektor manajemen perikanan memerlukan pengintegrasian yang harmonis dari 5 sektor. Pertama, *Innovation and Technology* (Sari & Muslimah, 2020). Hal ditujukan sebagai teknik-teknik mengelola perikanan agar bisa menjadi lebih efisien dan memproduksi lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini selaras dengan konsep yang ditawarkan *Blue Economy* yaitu melakukan pengelolaan perikanan namun tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungan. Dengan inovasi dan teknologi yang baru, diharapkan mampu memperkaya sumber daya alam dan memproduksi hasil laut yang melimpah. Kedua, *Ecosystem and environment sustainability* (Sari & Muslimah, 2020). *Blue Economy* memastikan agar pembangunan infrastruktur di pesisir pantai tidak membahayakan lingkungan sekitar. Segala bentuk tindakan yang mengancam kestabilitasan laut harus diganti dengan tindakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan karena sumber daya alam yang berasal dari laut merupakan produk yang terbatas atau *limited* sehingga tidak ada yang bisa menjamin eksistensi dari produk-produk hasil laut tersebut langgeng hingga ke masa depan (Sari & Muslimah, 2020).

Ketiga, *alignments in fishermen and fish farmers.* Pengembangan ekonomi dari konsep *Blue Economy* tidak hanya ditujukan untuk meng-*improve* ekonomi makro, melainkan juga ekonomi mikro seperti perekonomian para nelayan dan para pembudidaya atau peternak ikan. pada ranah *Blue Economy, improving the macro and micro economic is not the only focus*, tetapi juga fokus terhadap kemakmuran atau *prosperity* masyarakat. *Fishermen and fish farmers* tidak hanya dibekali oleh kemampuan untuk menangkap, membudidayakan, berjualan, tetapi juga diajarkan bagaimana mereka mengembangkan usaha mereka dengan *innovative techniques*, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru (Sari & Muslimah, 2020).

Keempat, *government policy*. Dalam rangka agar bisa terlaksananya konsep *Blue*

Economy, maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah. Hal ini ditujukan agar pengelolaan perikanan memiliki peraturan atau regulasinya tersendiri sehingga hal ini dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meminimalisir segala bentuk tindakan yang merugikan biota dan ekosistem laut. Setidaknya terdapat 3 kebijakan terkait pengelolaan perikanan yang harus dibuat oleh pemerintah (Kementerian PPN & BAPENAS, 2014). Pertama, *input control,* yaitu kebijakan yang mengatur terkait *fisheries management areas* dan barang-barang yang diizinkan untuk mengambil ikan. Kedua, *output control,* yaitu regulasi yang mengatur terkait jumlah ikan yang boleh ditangkap dan pemanfaatan ikan. Ketiga, *technical measures*, yaitu regulasi yang mengatur terkait metode-metode pengambilan ikan yang diizinkan (Sari & Muslimah, 2020).

Kelima, *Research and development*. Kegiatan *research and development* merupakan upaya dalam mencari jalan keluar berupa *innovative techniques* yang selaras dengan prinsip yang ditawarkan *Blue Economy*. Hasil dari kegiatan *research and development* akan lebih lebih apabila penelitian dilakukan dengan asas terbuka, sehingga *Fishermen and Fisher farmers* mampu mengaplikasikan *innovative techniques* yang bisa menunjang perekonomian mereka sekaligus *preserving the ecosystem and environment* (Sari & Muslimah, 2020).

3. Analisis pengambilan keputusan Blue Economy oleh Joko Widodo dengan menggunakan Teori Decision Making Actor Rational

Sejalan dengan prinsip-prinsip Blue Economy yakni kebijakan pada sektor kelautan dan perikanan yang seharusnya difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara imbang untuk melalui diversifikasikan kegiatan ekonomi sehingga mampu untuk meningkatkan jumlah dan keberagaman produk yang memiliki nilai tambah untuk mensejahterakan masyarakat dan menjamin perlindungan lingkungan dari pencemaran ekosistem laut yang dapat memberikan dampak negatif bagi. Selanjutnya, ekonomi biru merupakan model dari pembangunan ekonomi yang dapat menyatukan pembangunan laut dan darat, serta menekan pengoptimalan dalam memanfaatkan teknologi, perindustrian, tanah dan perairan lautan dalam rangka untuk meningkatkan secara menyeluruh taraf untuk pemanfaatan sumber daya laut yang dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia sendiri. Indonesia juga berperan

aktif pada berbagai forum internasional atau organisasi internasional dalam mengangkat dan membahas *Blue Economy* pada forum-forum penting tersebut (Rani & Cahyasari, 2015).

Dengan adanya pendekatan *Blue Economy*, diharapkan dapat memberikan keuntungan dari sektor kelautan dan mampu menjadi motor pada pembangunan nasional dan sumber dari pertumbuhan baru. Berdasarkan kebijakan pembangunan kelautan nasional yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 pada misi yang ketujuh, dengan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepaulauan yang independen, maju, kuat, dan berbasis pada *national interest* melalui pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan untuk negara Indonesia (Rani & Cahyasari, 2015).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di kerangka konseptual di atas, bahwasanya dalam mengambil kebijakan dengan teori *decision making*: Model Aktor Rasional, terdapat beberapa komponen yang terbentuknya pengambilan keputusan tersebut, yang di antaranya: tujuan dan sasaran, alternatif, konsekuensi atau akibat dan juga pilihan (Paramita, 2014). Oleh karenanya, Joko Widodo, selaku aktor rasional dalam mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan *Blue Economy* tentu saja memiliki tujuan, pilihan alternatif, konsekuensi atau akibat, dan juga pilihan yang akhirnya dipilih. Berdasarkan analisis penulis, tujuan dan sasaran Jokowi menerapkan *Blue Economy* adalah untuk mendukung suksesnya SDGs dan menkonservasi ekosistem laut Indonesia hingga tahun 2030. Adapun alternatifnya, Joko Widodo menggabungkan konsep pembangunan ekonomi *Green Economy* dengan *Blue Economy*. Adapun akibat atau

konsekuensi, dalam hal ini, Indonesia perlu menyetop untuk sementara segala tindakan eksploitasi yang berdampak pada keuntungan nasional dan dialihfungsikan ke eksplorasi dan *innovative techniques*. Selanjutnya, *International Non-Government Organization* (INGO) *Green Peace* berpeluang untuk mengetahui lebih jauh terkait kondisi dan situasi ekosistem laut di Indonesia, yang dengannya dapat memperkeruh citra positif Indonesia di mata dunia. Dari segi konsekuensi positifnya, Indonesia dapat meneruskan pembangunan infrastrukturnya secara bersamaan dengan mengkonservasi SDA laut dan meminimalisir terjadinya *climate change*. Oleh karena itu, Indonesia mampu meraup keuntungan ekonomi dari hasil SDA laut secara maksimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan konsep *Blue Economy* dalam

membangun infrastruktur kelautan sekaligus mengkonservasi ekosistem laut oleh Joko Widodo menjadi suatu alternatif pilihan yang paling menguntungkan bagi Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya akan memliki tantangan dan hambatan. Begitu pula dengan mengimplementasikan SDGs di Indonesia. Dari segi proses pelaksanaan SDGs ditingkat nasional juga masih meninggalkan permasalahan seperti mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non pemerintah dan juga proses partisipasi itu sendiri. Konsep pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya telah disepakati oleh Indonesia sejak 2015 silam yang merupakan pembaharuan terkait konsep dari *Millenium Development Goals* (MDGs). Kesepakatan SDGs memiliki 17 tujuan yang didalamnya terdapat kualitas pembangunan masing-masing negara. Jika pada awalnya MDGs hanya memiliki 8 tujuan, konsep SDGs ini meningkatkan tujuan-tujuan yang mendasar pada 5 prinsip dasar yang menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, serta lingkungan, yaitu *people, planet, prosperty, peace, and partnership.*

Dalam pengembangan konsep SDGs yang belum optimal ini perlu adanya konstribusi yang melibatkan peranan dari *stakeholder* atau dari kalangan non-pemerintah seperti, *civil society organization*, akedemisi, Mahasiswa, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan berbasis wilayah maritim sebagai salah satu tujuan negara poros maritim dunia, maka pembangunan terhadap wilayah pesisir perbatasan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan maritim tersebut. Dengan Poros Maritim dunia, Indonesia akan menjadi negara dengan identitas maritim yang kuat. Pemberdayaan seluruh masyarakat pesisir dalam sektor poros maritim dapat menjadi faktor pemerataan ekonomi Indonesia. Lekat dengan budaya orientasi darat membuat masyarakat tidak mengetahui isu-isu maritim. Padahal pemberdayaan di sektor kemaritiman dapat menjadi instrumen bagi Indonesia untuk memiliki posisi yang lebih unggul dan berpengaruh terdapat pasar ekonomi regional maupun internasional. Oleh karena itu pengembangan konsep berkelanjutan yang didasarkan pada konsep *Blue Economy* tentu saja dapat mendukung keberhasilan pembangunan yang berbasis

pada eksplorasi dan bukan eksploitasi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Blue economy merupakan pedoman paling tepat yang diperlukan untuk membantu memperbaiki ekonomi yang rusak dan membuat model yang lebih berkelanjutan. Ide-ide baru dan pemikiran inovatif yang terangkum didalamnya, menawarkan pilihan-pilihan baru yang menarik mengenai bagaimana mengubah ekonomi agar dapat membuat lapangan pekerjaan baru sekaligus mempertahankan kehidupan sosial yang sehat untuk kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Afinotan, L. A. (2014). Decision-Making on International Relations: A Theoretical Analysis. *Canadian Social Science*, *10*(5), 249–256. https://doi.org/10.3968/4970

FAO. (2020). The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. In *Food Agriculutre Organization*. FAO. https://doi.org/10.4060/CA9231EN

Indonesiabaik. (2018). *Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan*. Indonesiabaik.Id. https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan

Irawan, F. B. (2019). Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 26–35.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2012). *kebijakan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru*. Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). *Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2018*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2018). *Potret Keberhasilan Program Pioritas Tahun 2015-2018*. Biro Perencanaan Kemeterian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Kementerian PPN. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). *Kementerian PPN*.

Kementerian PPN, & BAPENAS. (2014). *kajian strategi pengelolaan perikanan berkelanjutan*. Direktorat Kelautan dan Perikanan.

Marine Stewardship Council. (2022). *Climate change and fishing* . Marine Stewardship Council. https://www.msc.org/what-we-are-doing/oceans-at-risk/climate-change-and-fishing

Marine Stewardship Council. (2022b). *Oceans at risk* . Marine Stewardship Council. https://www.msc.org/what-we-are-doing/oceans-at-risk?gclid=Cj0KCQjw1N2TBhC

OARIsAGVHQc7KHfwjFyJTOJVxJCq8W0lIp2Wqaot6Oz1lniziQ5s4rrinl72OiE8aAluPEALw_wcB

National Geographic Indonesia. (2019, March 5). *9 Ancaman Terbesar yang Dihadapi Laut dan Isinya Akibat Ulah Manusia*. National Geographic Indonesia. https://nationalgeographic.grid.id/read/131656602/9-ancaman-terbesar-yang-dihadapi-laut-dan-isinya-akibat-ulah-manusia?page=all

Nurhayati, S., & Putri, F. hutami. (2013). Blue and Economy Policy and Their Impact To Indonesian Community Welfare. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *12*, 37–42.

Paramita, D. (2014). Analisis Penghentian Proyek Bendungan Myitsone oleh Myanmar terhadap Cina Tahun. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, *3*(1), 157–175. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi68b1ec92f6full.pdf

Pauli. (2010). The BLUE ECONOMY 10 Years - 100 Innovations 100 MILLION JOBS This blue paper provides a brief overview on the opportunitie s a Blue Economy. *Australian Blue Paper No 1 The BLUE ECONOMY 10 Years - 100 Innovations 100 MILLION JOBS*, *1*, 1–10.

Prayuda, R., Sary, D. V., & Riau, U. I. (2019). STRATEGI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP BLUE ECONOMY TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN a. *Indonesian Journal of International Relations*, *3*(2), 46–64.

Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, *7*(1), 1914–1928.

Sari, D. A. A., & Muslimah, S. (2020). Blue economy policy for sustainable fisheries in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 423, Issue 1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012051

Subagyo, A. (2004). *ANALISIS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENYUSUNAN UU NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI : "IMPLEMENTASI MODEL ANALISIS GRAHAM T. ALLISON."* 1–7.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabet.

UN Sustainbale Development Group. (2022, March 11). *The 5Ps of the SDGs: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership*. UN Sustainbale Development Group. https://unsdg.un.org/latest/videos/5ps-sdgs-people-planet-prosperity-peace-and-partnership

Zoological Society of London. (2015). Living Blue Planet Report. In *Educational Research Review*. http://www.worldwildlife.org/publications/living-blue-planet-report-2015